

## DAFTAR PUSTAKA

- Adissya Mega Christia, B. I. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 149-163.
- Amoy Dameria Simamora, R. M. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS pada SDS Advent 6 Medan. *Transekonomika*, 121. Dipetik May 14, 2024, dari <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/624/527>
- Anas Iswanto, H. H. (2023). Dalam *Ekonomi Indonesia Kini dan Esok* (hal. 23-27). Makasar: Unhas Press.
- Arifah, U. (2018). Kebijakan Publik dalam Anggaran Pendidikan. *Journal Cakrawala IAINU Kebumen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)*, 1-21.
- Arikunto, S. (2010). Metode Penelitian . *Rineka Cipta*, 173.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 66-67.
- Diana, N. (2022). Tinjauan Atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Masa Pandemi Covid-19 DI SDN 02 Mayangan Tahun Anggaran 2021. *Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Febrilita Anggelina Lombo, N. R. (2022). Transparansi Pemerintah Kecamatan Dalam Pelayanan Akta Jual Beli. *Jurnal Governance*, 2, 2-3.
- Kadek Gita Puspita Saisarani, N. K. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di Sma Negeri 4 Singaraja Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 11 No. 2.
- Kartiwa, I. (2023, 1 17). *Dinamika Pengelolaan Dana BOSP Tahun 2023*. Diambil kembali dari indonesiana.id: <https://www.indonesiana.id/read/161243/dinamika-pengelolaan-dana-bosp-tahun-2023>
- Kurniawati, F. N. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan. *AoEJ: Academy of Education Journal*, 2.
- Majid, A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Aksara Timur.
- Moleong, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muryati, I. (2016). Pengelolaan Dana BOS Pada SD Negeri Di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 237-246. Diambil kembali dari CEPAT SALURKAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN, KEMENDIKBUDRISTEK TETAP UTAMAKAN AKUNTABILITAS: <https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/cepat-salurkan-bantuan-operasional-satuan-pendidikan-kemdikbudristek-tetap-utamakan-akuntabilitas>

- Nasution, D. A. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah. *AQLI*, 2, 154-155.
- Peraturan Pemerintah . (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Peraturan Pemerintah. (2010). *Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Dipetik 3 21, 2024, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Permendagri. (2023). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah*. Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/248170/permendagri-no-3-tahun-2023>
- Permendikbud. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler*. Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163578/permendikbud-no-8-tahun-2020>
- Permendikbud. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021*. Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163577/permendikbud-no-6-tahun-2021>
- Permenkeu. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Khusus Nonfisik*.
- Pribadi, R. E. (2017). Implementasi Sustainable Development Goals. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 1-16.
- Rachmawati, U. (2023). Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Dalam Program RKAS DI SDN Made 1 Surabaya. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 3(2), 212-219.
- Ratnadilla Ukkas, H. A. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jemsi*, 200. Dipetik May 16, 2024, dari <https://dinastirev.org/JEMSI/article/view/1207/753>
- Rizki, S. F. (2014). Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan. *Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro*.
- Sitepu, A. P. (2022). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cv. Azka Pustaka.
- Sudaryanti, D. (2013). Pengaruh Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta*, 12, 13. Diambil kembali dari <https://media.neliti.com/media/publications/5135-ID-pengaruh-penganggaran-terhadap-kinerja-aparat-pemda-melalui-sistem-informasi-keu.pdf>
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Sulfiati F, A. S. (2010). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3, 113-122.

Tarigan, E. P. (2013). Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 17, 32-33.

Undang-Undang Republik Indonesia . (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

